



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA MANNA

Jl. Raya Padang Panjang Manna Bengkulu Selatan
Email : surat.pamanna@gmail.com. web : www.pa-manna.go.id
Telp.0739-22004/073922005 Fax. 0739-22004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA MANNA



PENGADILAN AGAMA MANNA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Syazili, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Manna
selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.

Manna, Januari 2017

Pihak Pertama,



Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MANNA

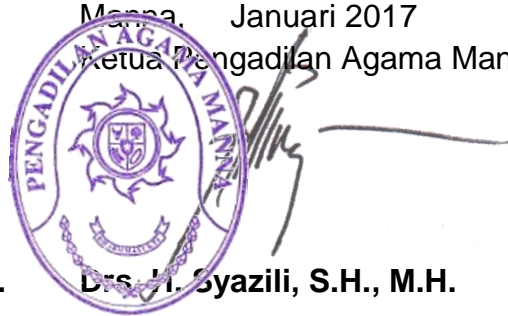
No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase produktifitas memutus perkara	100 %
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	99,5 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 192
3	Meningkatnya akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100 %
		b. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama yang terpenuhi	100 %
		c. Persentasi sidang keliling yang dilaksanakan	100 %
4	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik	100 %
		b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100 %

5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
		c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	100 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90 %
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		c. Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.604.712.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 129.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 63.500.000

Manna, Januari 2017
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Ketua Pengadilan Agama Manna,

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.



Drs. H. Syazili, S.H., M.H.